

**EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005 - 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh:

**EVIN SUSANTI
B 200 060 086**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sebagai Negara kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 alinia keempat. Dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materiil.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontrapretasi, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1977 : 22 dalam buku Darwin). Rumusan ini lebih menekankan fungsi budgeter dari pajak yaitu bagaimana penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi kas negara. Selain dari pajak

penerimaan negara juga dapat diperoleh dari retribusi, sumbangan, bea dan cukai, dana pinjaman dalam dan luar negeri, penghasilan dari perusahaan – perusahaan negara ataupun menciptakan uang.

Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku (Chaizi, 1985: 16 dalam buku Darwin). Jenis – jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh dari bumi

dan/atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau bangunan tersebut diwajibkan memperoleh manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh system administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagihasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah.

Selama lima tahun yaitu dari Tahun 2005-2009, Luas Bumi dan Luas Bangunan yang dikenakan pajak yang berada di Kabupaten Boyolali bertambah. Bertambahnya Luas Bumi disebabkan karena adanya update data, adanya lahan yang semula bukan merupakan objek PBB kemudian dialih fungsikan menjadi lahan yang menjadi objek pajak PBB dan luas bangunan disebabkan karena adanya pembangunan rumah atau kompleks perumahan yang ada di wilayah kabupaten boyolali.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya 10% merupakan bagian Pemerintah Pusat dan harus disetorkan ke Rekening Kas Negara untuk dibagikan kepada seluruh Daerah kabupaten atau kota. Pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Daerah dengan imbalan sebesar 9% untuk Biaya Pungut, 16,2% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 64,8% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan memperhatikan pembagian tersebut terlihat bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II. Dan pada Pemerintah Pusat sudah tidak menerima hasil pajak kekayaan lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun skripsi ini memilih judul **“EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005 - 2009”**

B. Perumusan Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan dipungut oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Oleh karena itu peneliti mengambil permasalahan:

“Apakah realisasi penerimaan PBB sesuai target penerimaan PBB untuk periode Tahun 2005-2009 yang telah ditetapkan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka secara obyektif penelitian ini bertujuan untuk

“Mengetahui realisasi penerimaan sesuai target penerimaan PBB untuk periode Tahun 2005-2009 yang telah ditetapkan”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang penerimaan pajak bagi dunia pendidikan.

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

c. Bagi Pembaca

Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca tentang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

E. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini dapat mencapai yang diinginkan, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini berisi tentang : Pengertian Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Realisasi, Tunggalan Pajak, Resiko, Coverage Ratio.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini berisi tentang : ruang lingkup penelitian, sumber data, jenis data, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA. Bab ini berisi tentang : Mengidentifikasi objek PBB, Mengidentifikasi NJOP Bumi dan Bangunan, Mengidentifikasi NJOPTKP PBB, Mengidentifikasi Target dan Realisasi PBB, Menganalisis pertumbuhan Realisasi PBB, Coverage Ratio PBB.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang : Kesimpulan, Keterbatasan penelitian, Saran.